

SOSIALISASI
PERMENPANRB 19/2018 TENTANG PENYUSUNAN
PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH
&
PERMENPANRB 20/2018 TENTANG PEDOMAN
EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH



Pekanbaru, 4 Oktober 2018

Sosialisasi:

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH PERMENPANRB 19/2018

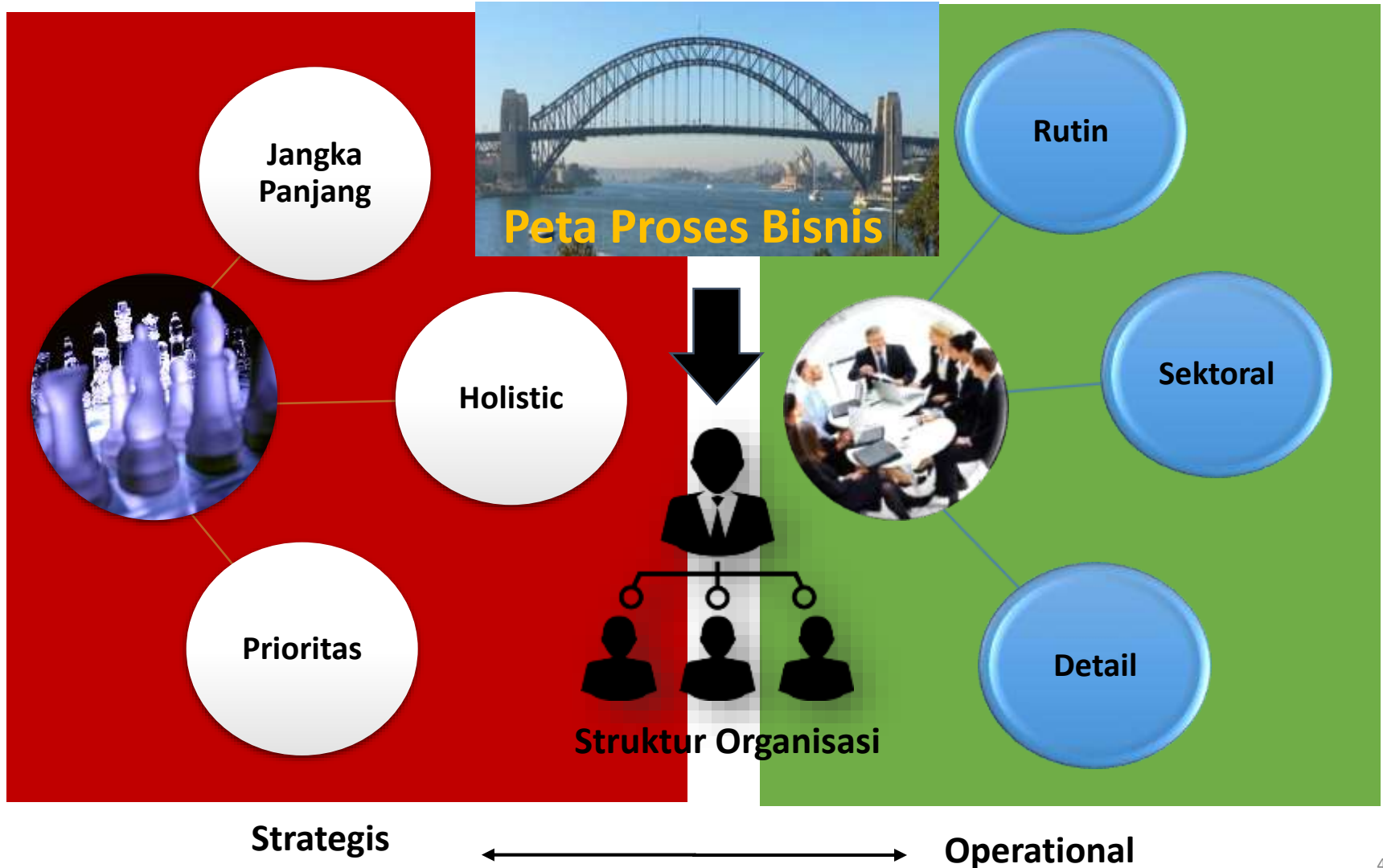
Disiapkan Khusus untuk:



Pekanbaru, 4 Oktober 2018

Konsep Proses Bisnis Instansi Pemerintah

Karakteristik Strategis & Operasional





Unless structure follows
strategy, inefficiency results.

Alfred D. Chandler, Jr.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 2

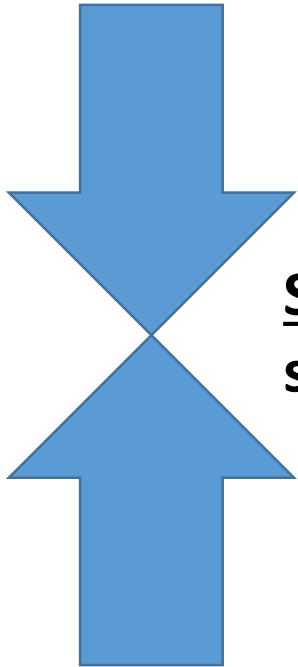
Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Managing Strategy & Operation

Managing strategy

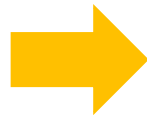


Success of managing strategy =
did not work (theoretical)

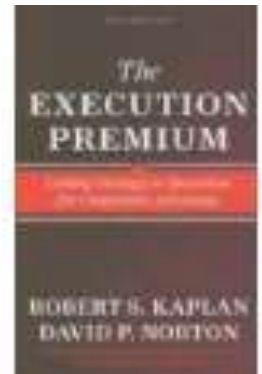


**Sustainable high performance organization takes
successful managing strategy & managing operation**

Managing operation

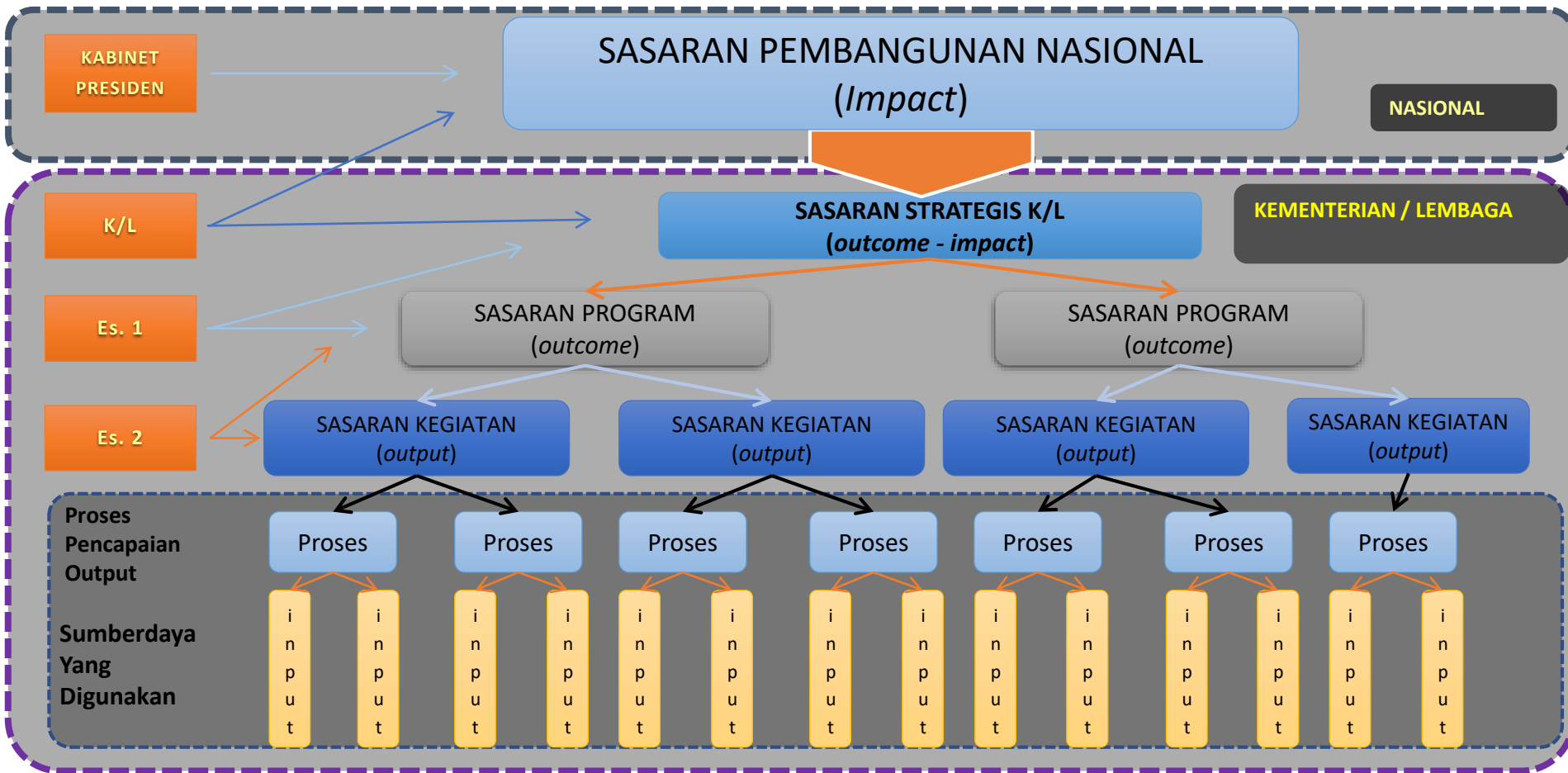


Success of managing operation
= a matter of luck



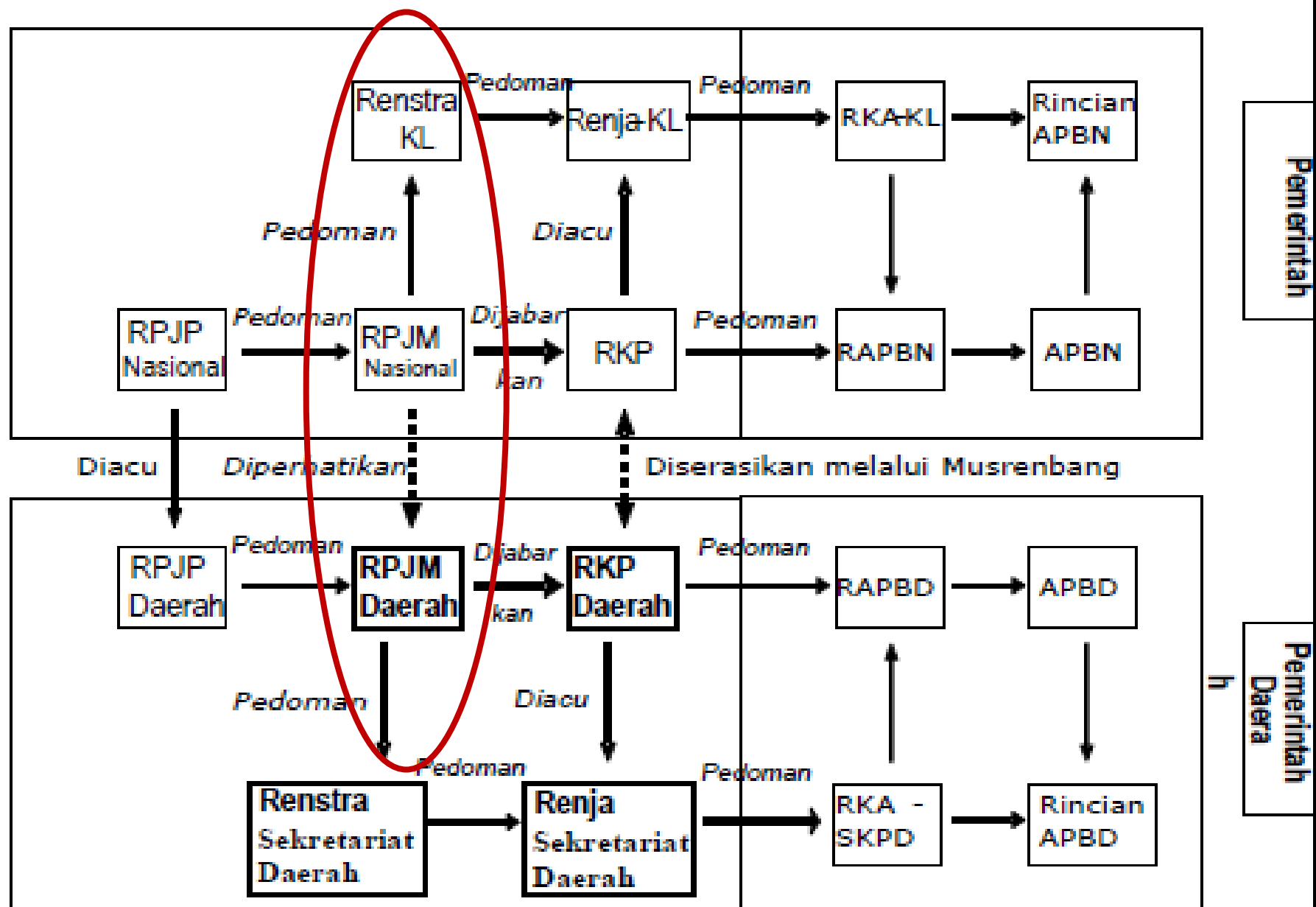
Source : "The Execution. Premium", Robert Kaplan & David Norton, 2008

HUBUNGAN KERANGKA KERJA PENCAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL UU 25 tahun 2004



Catatan:

- Bagi K/L yang terkait dengan Sasaran Pembangunan Nasional (*Impact*) dalam RPJMN maka K/L harus dapat menjabarkan ke dalam sasaran strategis Kementerian/Lembaga (*Outcome*).
- Sedangkan, bagi K/L yang tidak terkait dengan Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN maka Sasaran Strategis K/L akan dicantumkan dalam RPJMN.

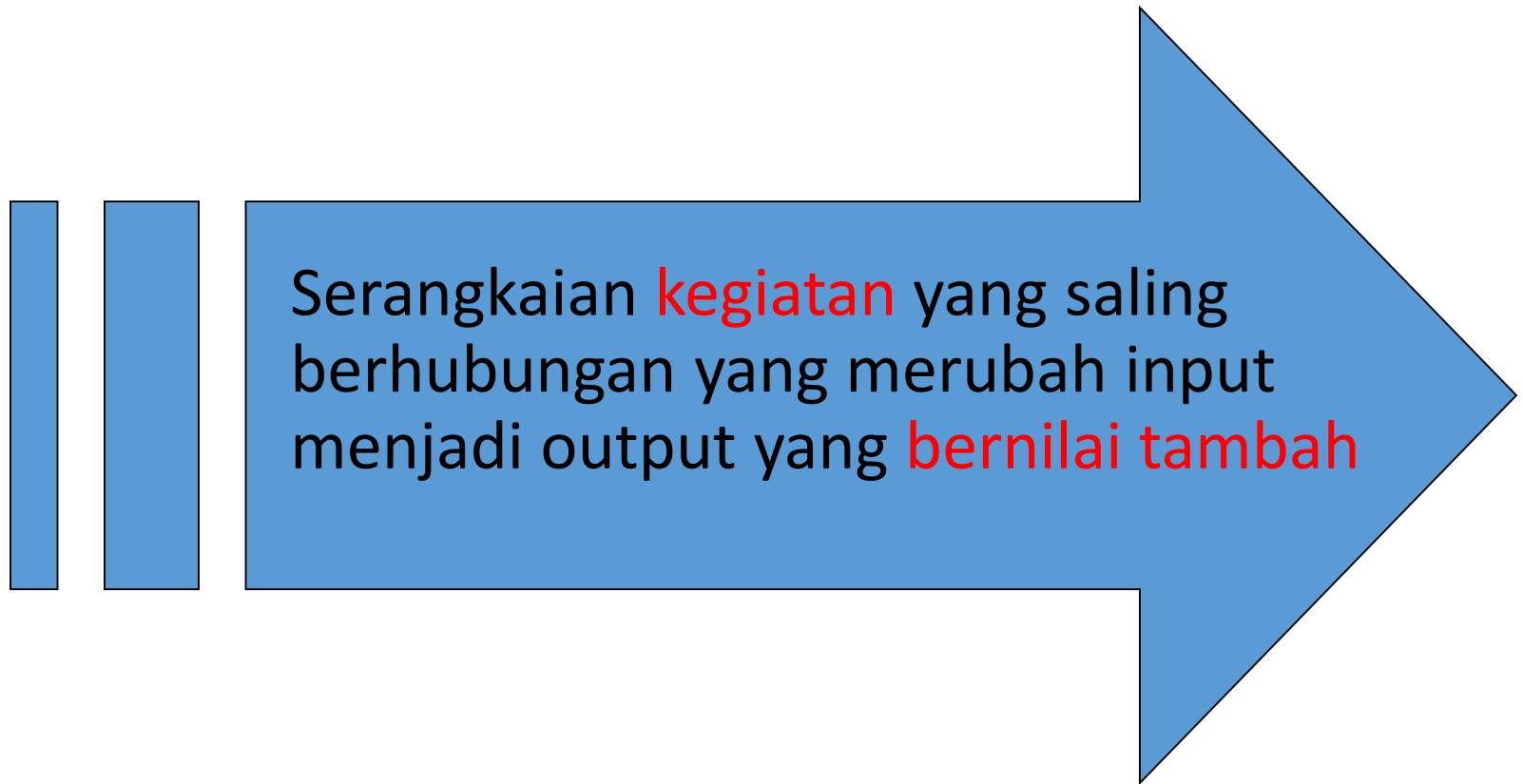


KEDUDUKAN RENSTRA SKPD

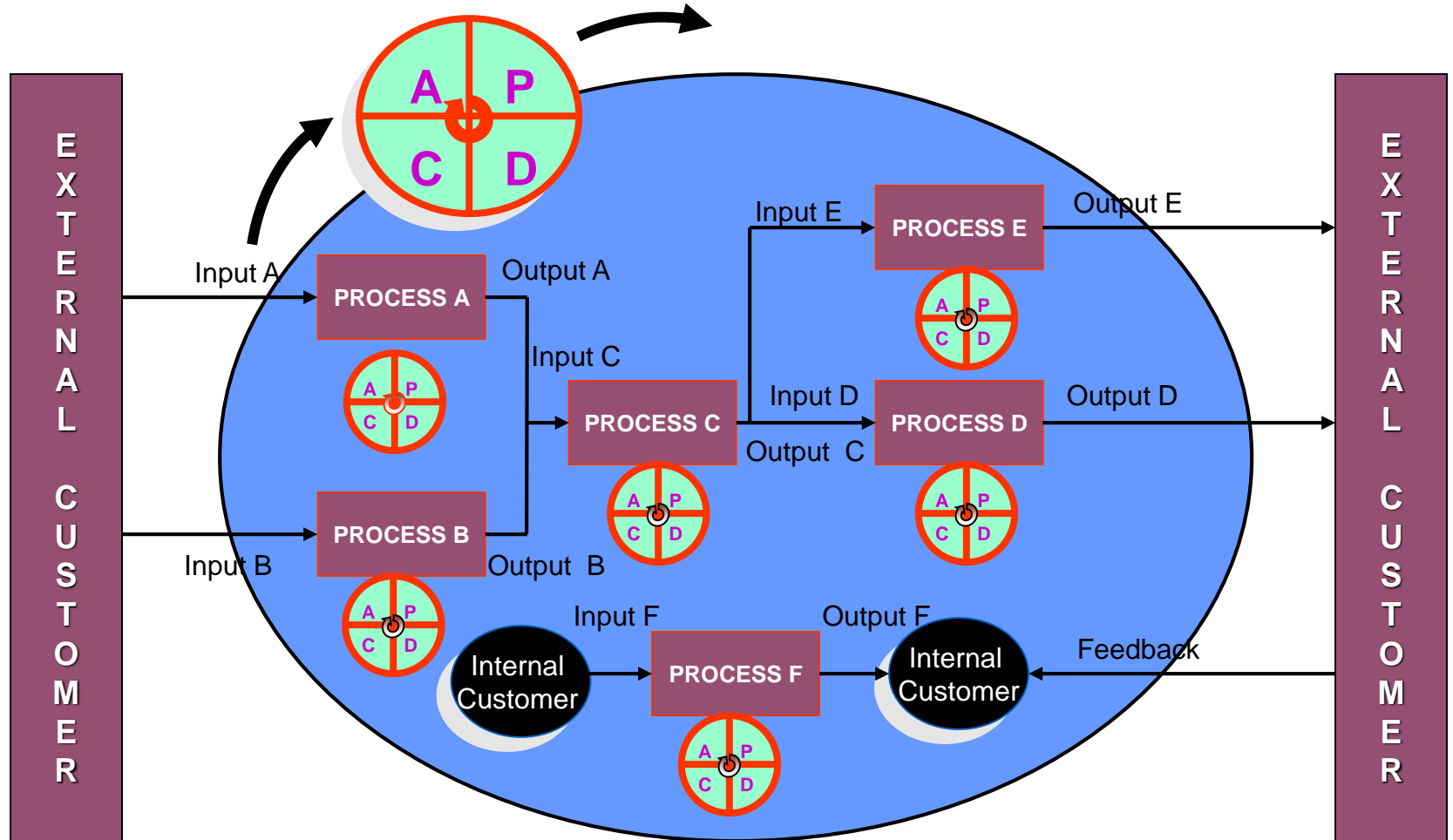
HIERARKI DOKUMEN PERENCANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



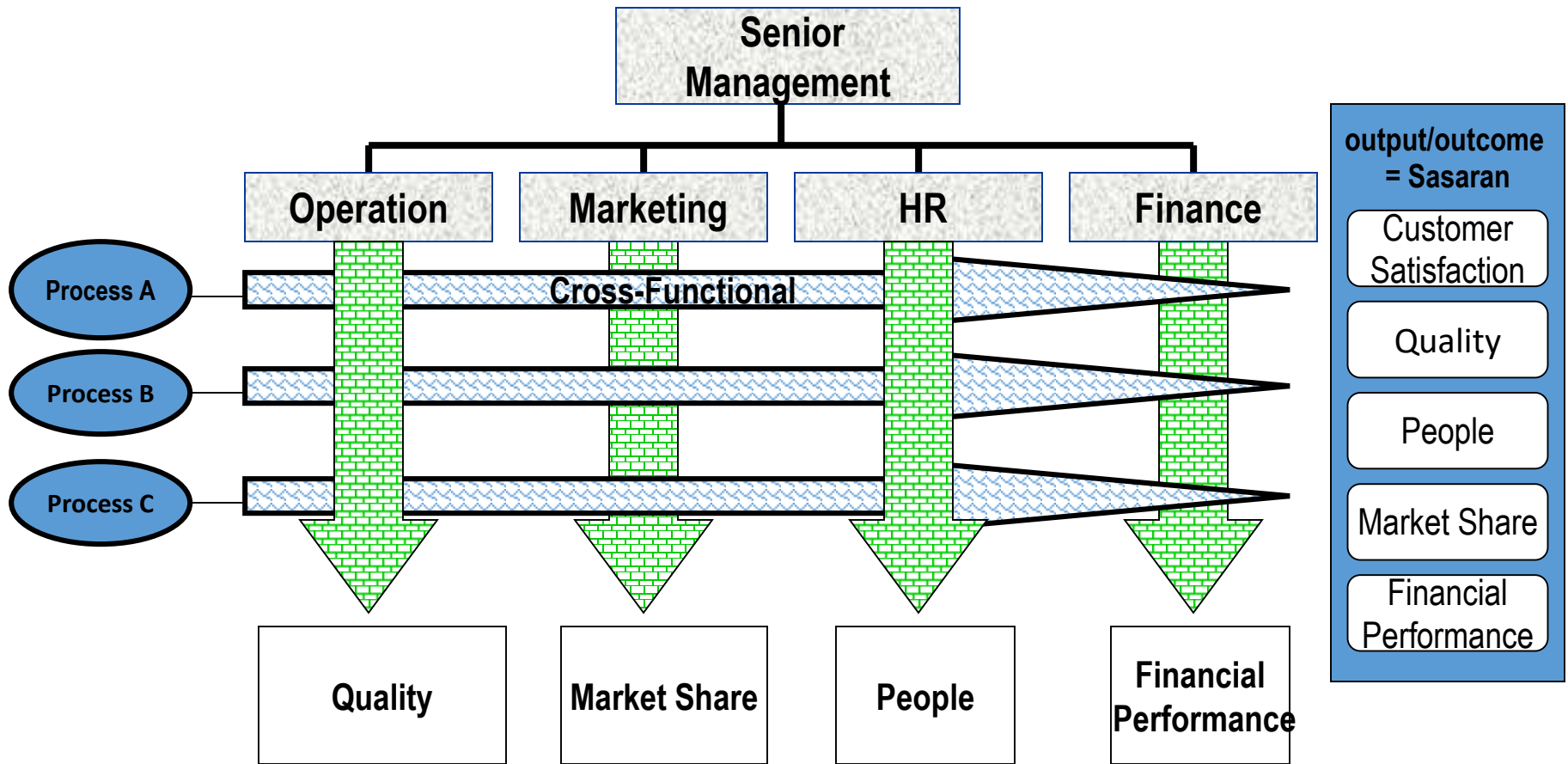
DEFINISI PROSES



TYPICAL NETWORK OF INTERACTING PROCESSES

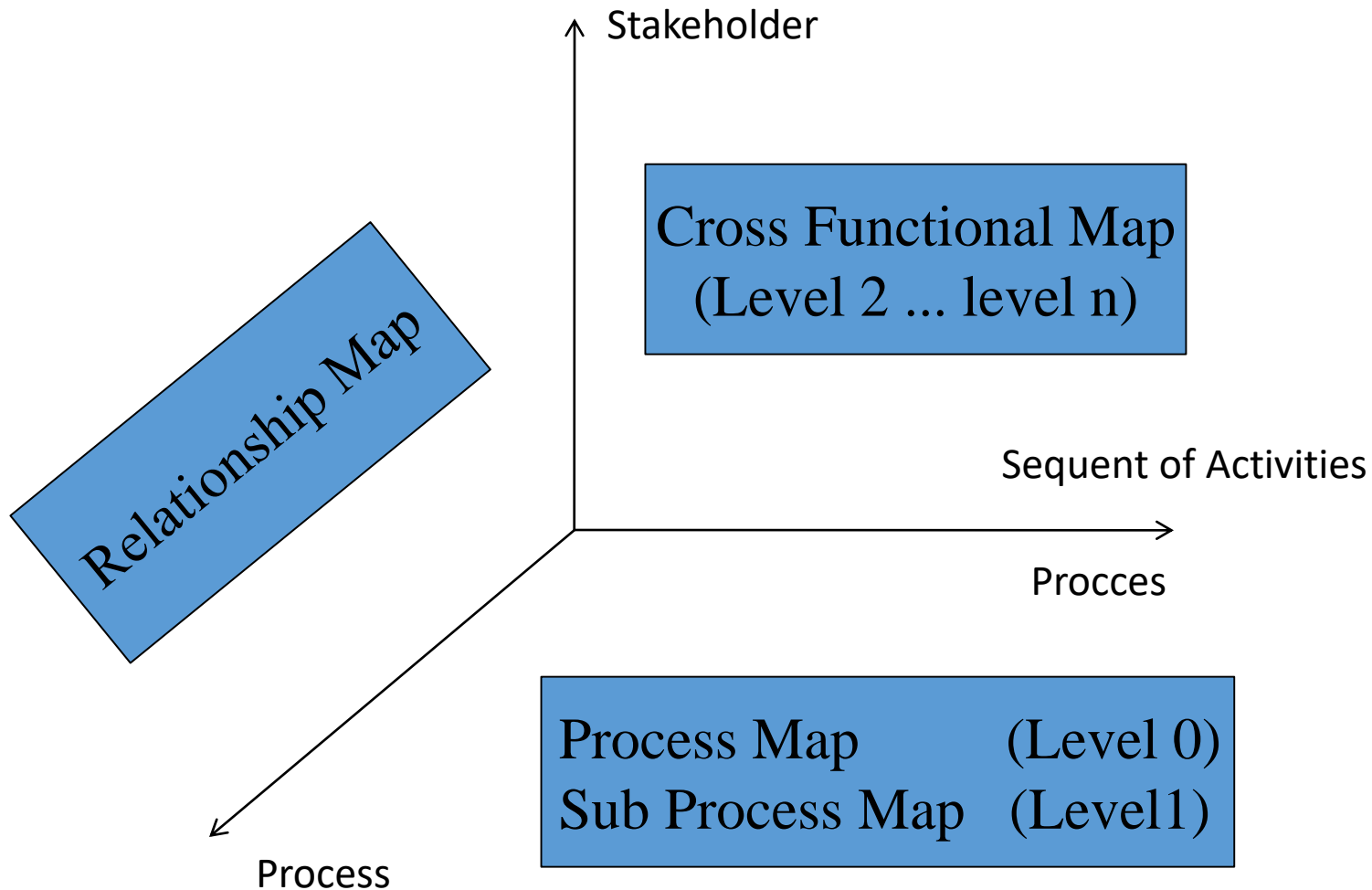


Proses Bisnis



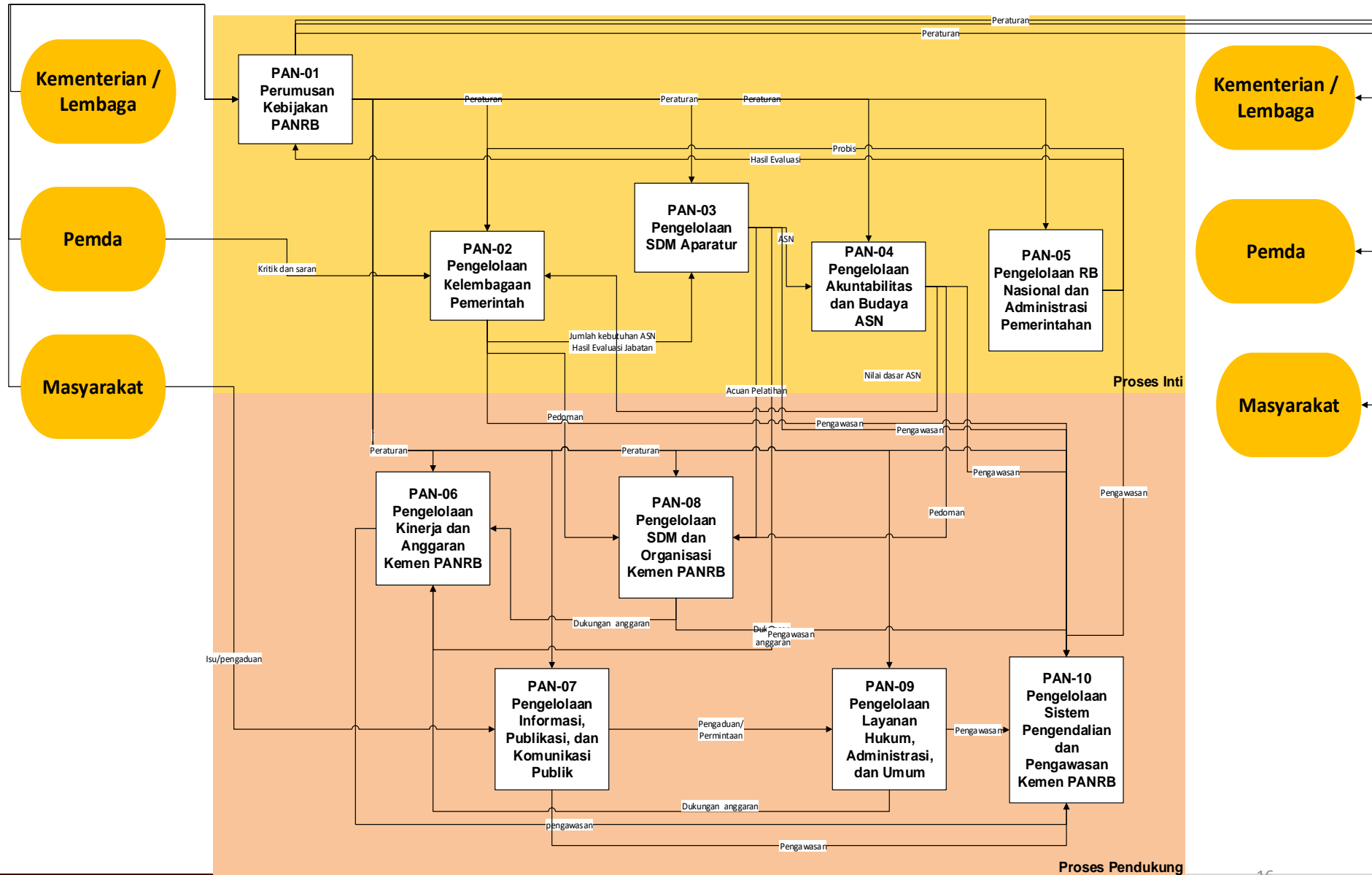
...to the horizontal, enterprise process organization with cross-functional drivers

Process Map Frame Work

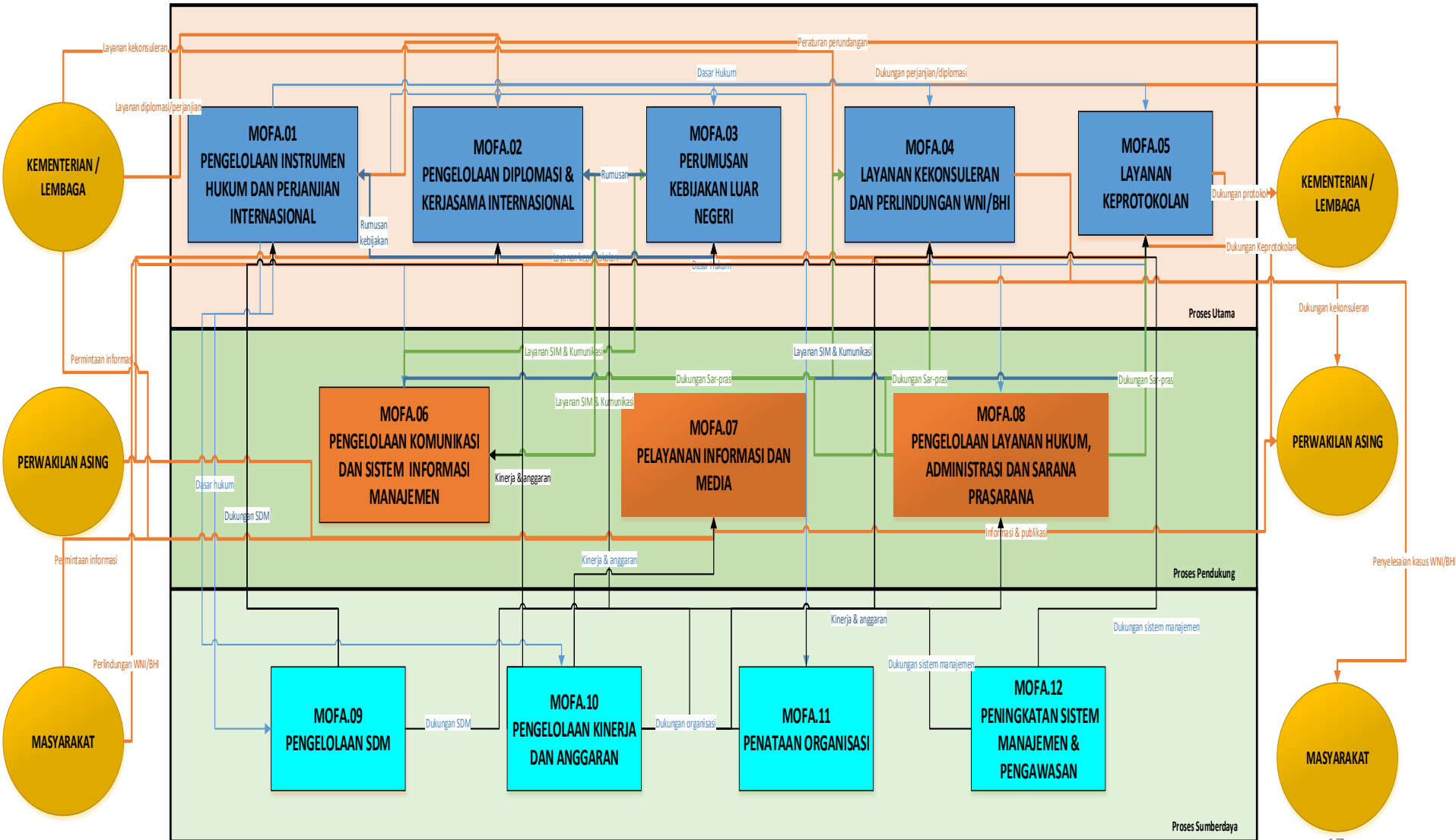


PETA PROSES BISNIS

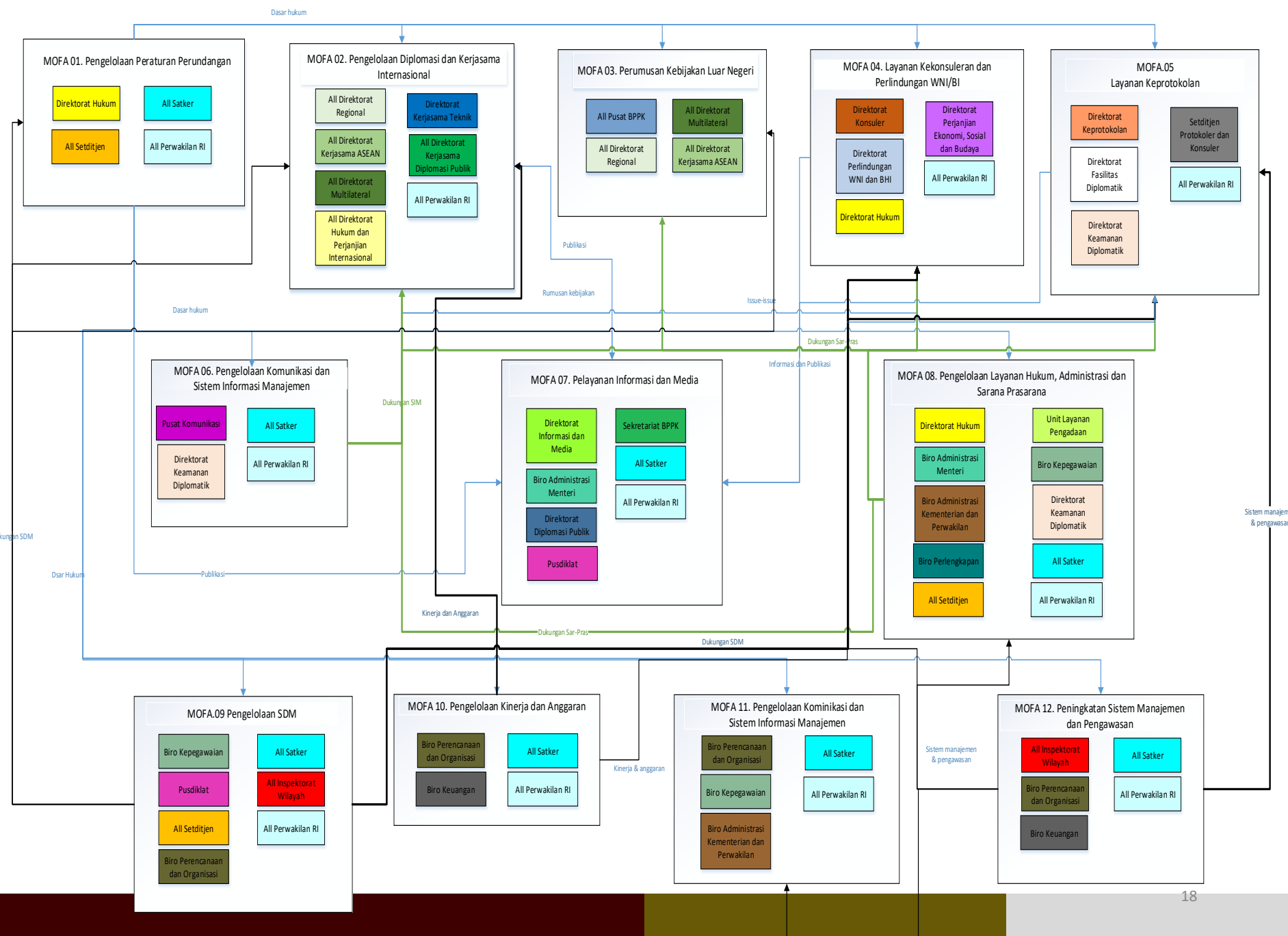
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA-REFORMASI BIROKRASI



PETA BISNIS PROSES KEMENTERIAN LUAR NEGERI

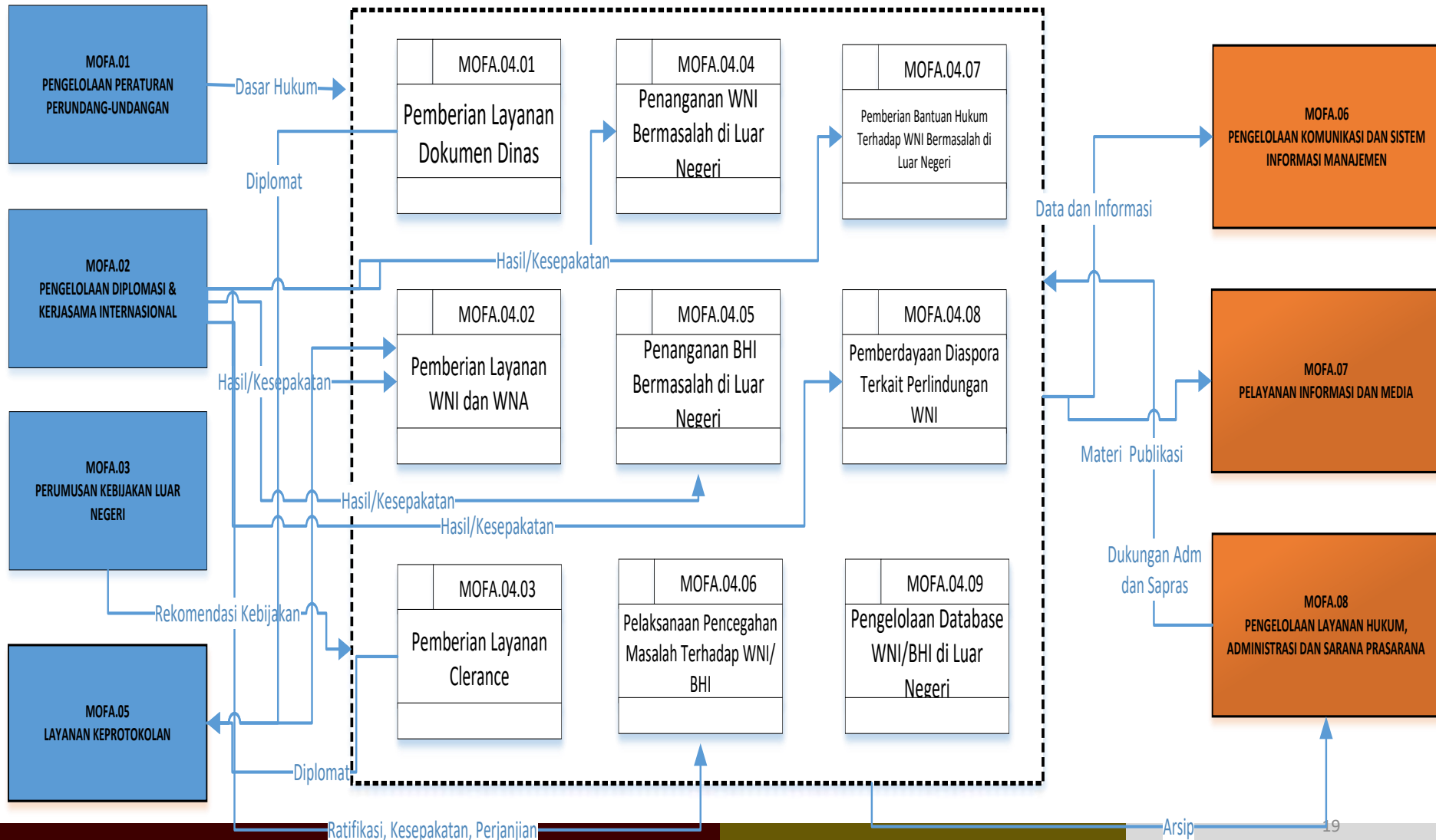


RELATIONSHIP MAP



SUBPROCESS MAP

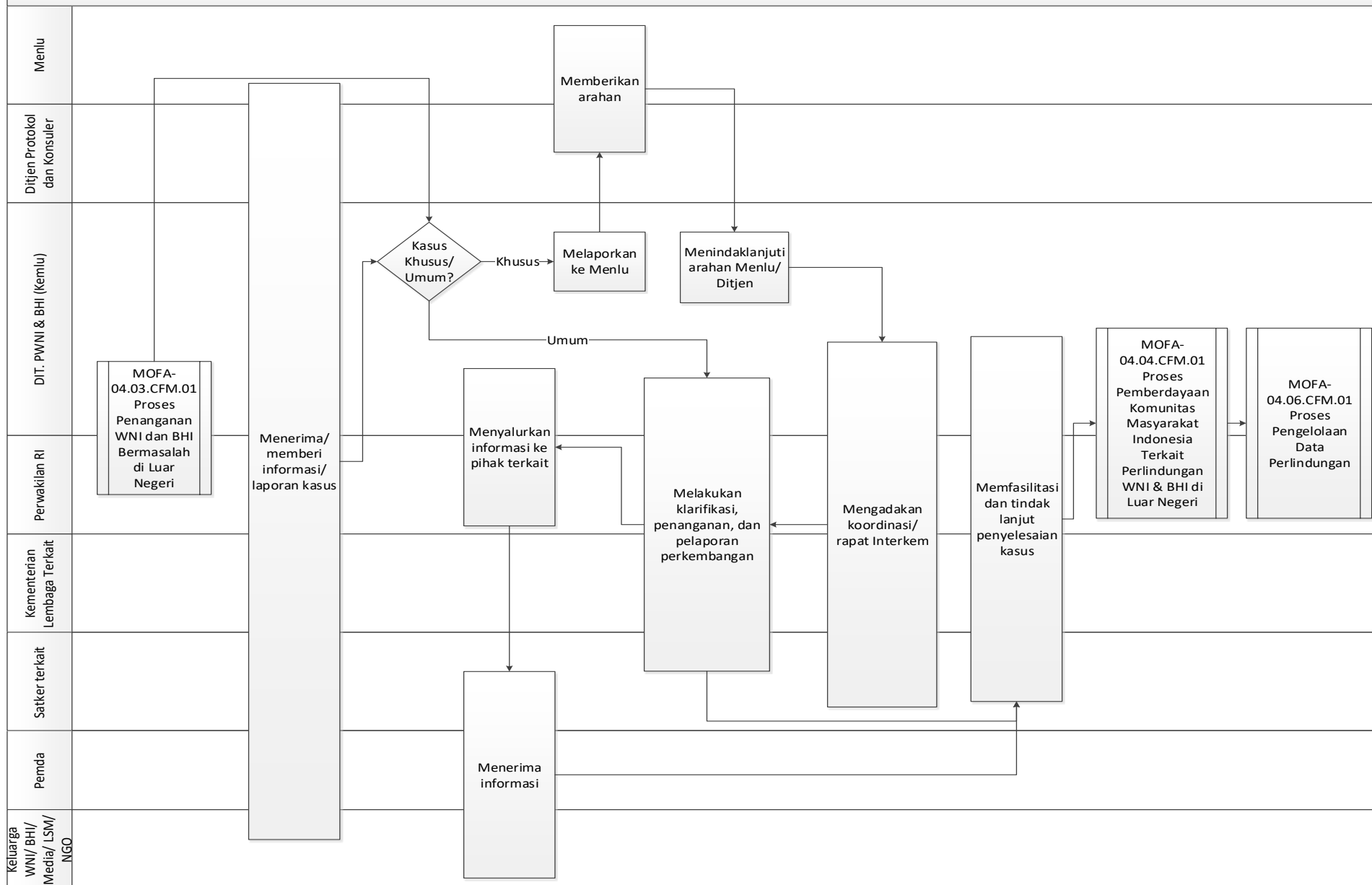
MOFA 04. LAYANAN KEKONSULERAN DAN PERLINDUNGAN WNI/BHI



CROSS FUNCTIONAL MAP

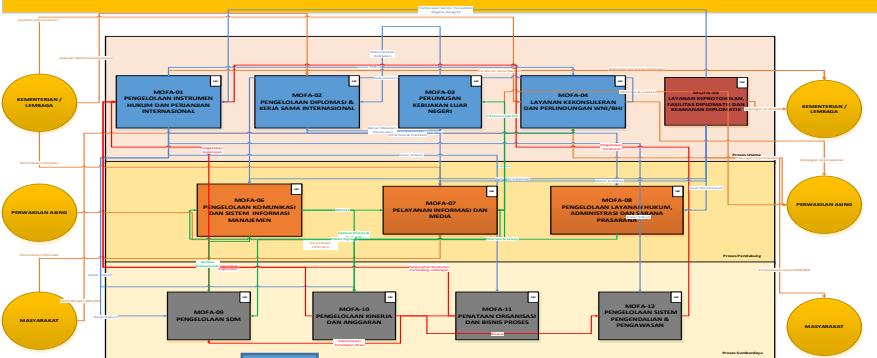
MOFA-04.03.CFM.01 Penanganan WNI dan BHI Bermasalah di Luar Negeri

Phase



PETA BISNIS PROSES

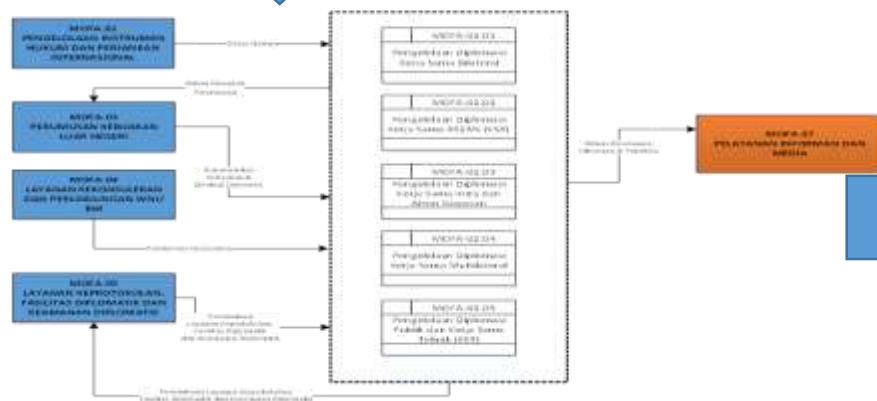
PETA BISNIS PROSES KEMENTERIAN LUAR NEGERI



1

PETA SUB PROSES

SUBPROCESS MAP MOFA-02 PENGOLAHAN DIPLOMASI DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

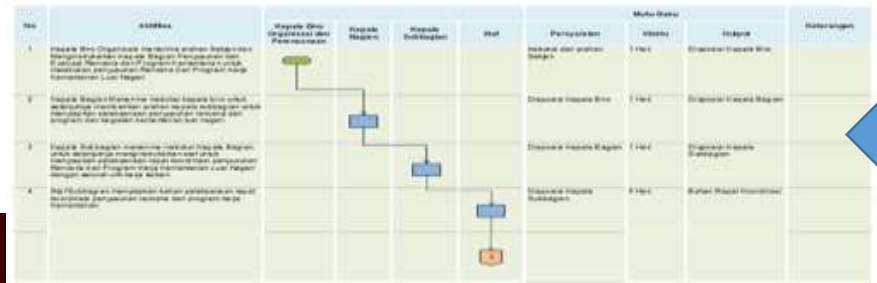


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MIKRO



STANDARD OPERATING PROCEDURES

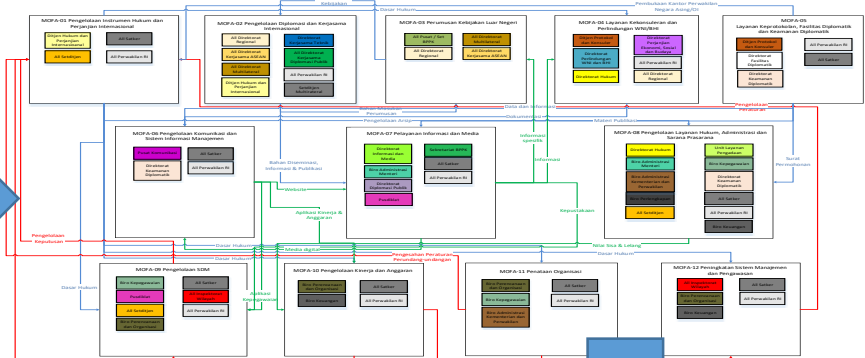
KODE SOP : MOFA-02.01.CFM.01.SOP.01
NAMA SOP : Pengelolan Diplomasi Kerjasama Bilateral
HALAMAN : 1 dari 2



6

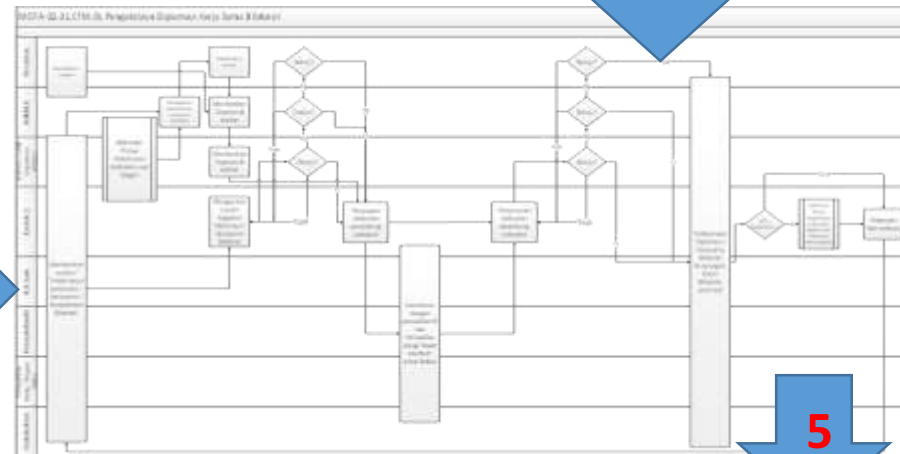
PETA HUBUNGAN

RELATIONSHIP MAP KEMENTERIAN LUAR NEGERI



3

PETA LINTAS FUNGSI



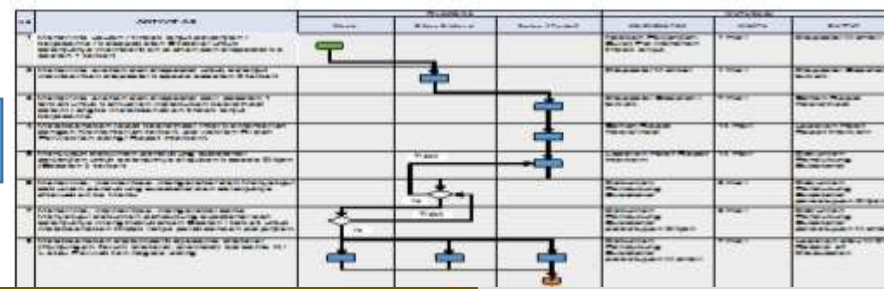
5

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAKRO



STANDARD OPERATING PROCEDURES

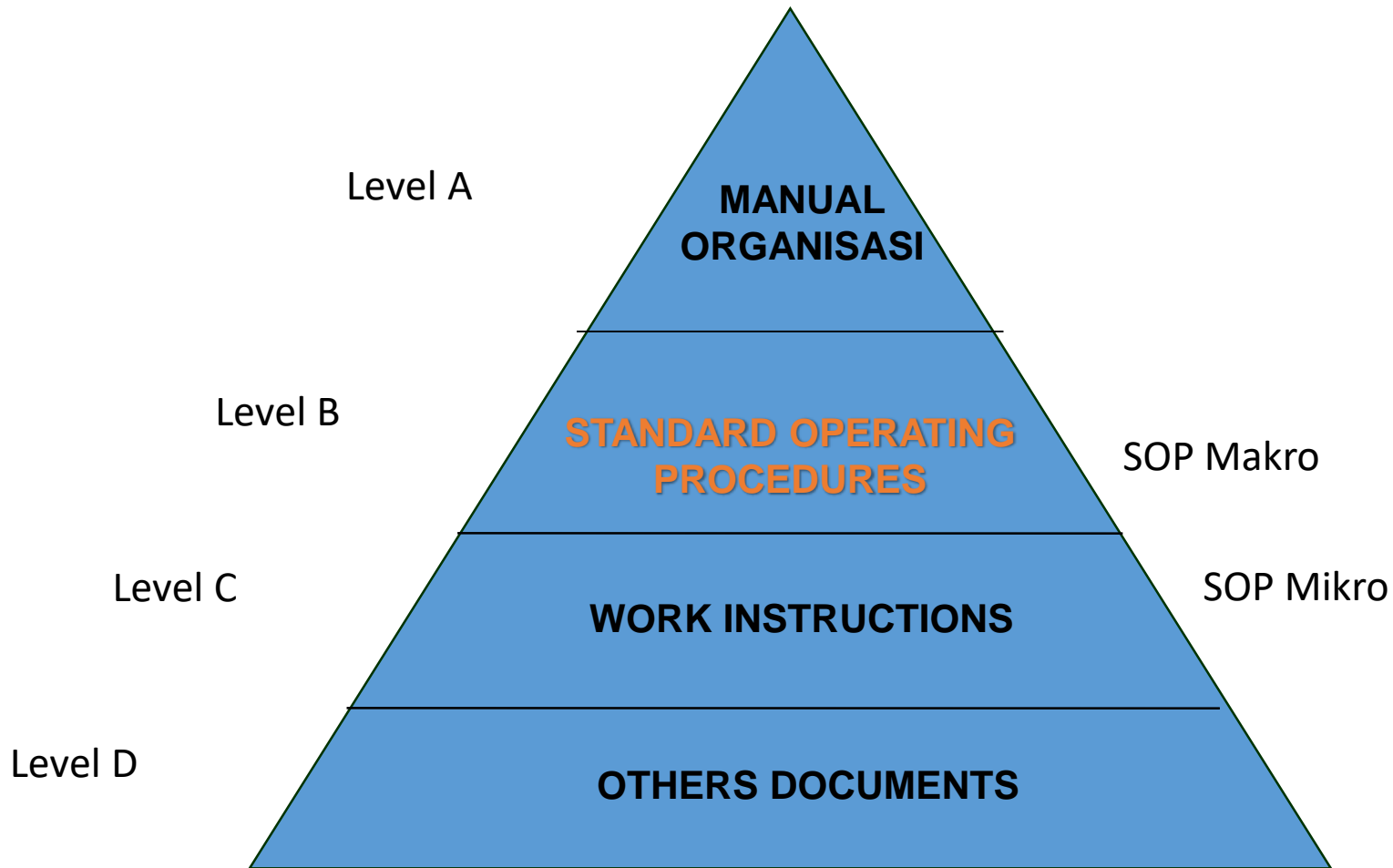
KODE SOP : MOFA-02.01.CFM.01.SOP.01
NAMA SOP : Pengelolan Diplomasi Kerjasama Bilateral
HALAMAN : 1 dari 2



DAFTAR SOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI

NO	BUSINESS PROCESS MAPPING	KODE	JUDUL SUB PROSES	KODE CFM	JUDUL CFM	KODE SOP	JUDUL SOP
MOT-01	PENGELOLAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	MOT-01.01	UNDANG-UNDANG BIDANG PERDAGANGAN	MOT-01.01.CFM.01	UNDANG-UNDANG BIDANG PERDAGANGAN	MOT-01.01.CFM.01.S OP.01	PERENCANAAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG BIDANG PERDAGANGAN
						MOT-01.01.CFM.01.S OP.02	PERSIAPAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BIDANG PERDAGANGAN
						MOT-01.01.CFM.01.S	PENGAJUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
		MOT-01.02	KEPESERTAAN PEMBAHASAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	MOT-01.02.CFM.01	KEPESERTAAN PEMBAHASAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	MOT-01.02.CFM.01.S OP.01	KEPESERTAAN PEMBAHASAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		MOT-01.03	PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BIDANG PERDAGANGAN	MOT-01.03.CFM.01	PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BIDANG PERDAGANGAN	MOT-01.03.CFM.01.S OP.01	PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BIDANG PERDAGANGAN
		MOT-01.04	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN	MOT-01.04.CFM.01	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN	MOT-01.04.CFM.01.S OP.01	PENYUSUNAN PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
		MOT-01.05	PERATURAN KEPALA BAPEBBTI	MOT-01.05.CFM.01	PERATURAN KEPALA BAPEBBTI	MOT-01.05.CFM.01.S	PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA BAPEBBTI
		MOT-01.06	PERATURAN DI BIDANG JABATAN FUNGSIONAL DI BAWAH PEMBINAAN KEMENDAG	MOT-01.06.CFM.01	PENYUSUNAN PERATURAN DI BIDANG JABATAN FUNGSIONAL DIBAWAH PEMBINAAN KEMENDAG	MOT-01.06.CFM.01.S OP.01	PENYUSUNAN PERATURAN DI BIDANG JABATAN FUNGSIONAL DIBAWAH PEMBINAAN KEMENDAG
MOT-02	PENGAMANAN PASAR DALAM NEGERI	MOT-02.01	PENGAWASAN BARANG DAN JASA PRA-PASAR	MOT-02.01.CFM.01	PELAYANAN PENDAFTARAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN	MOT-02.01.CFM.01.S OP.01	PELAYANAN PENDAFTARAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
				MOT-02.01.CFM.02	PENGAWASAN KINERJA LPK TERDAFTAR	MOT-02.01.CFM.02.S OP.01	PENGAWASAN KINERJA LPK TERDAFTAR
				MOT-02.01.CFM.03	PELAYANAN PENERBITAN SKPLBI DAN SPKPLBI	MOT-02.01.CFM.03.S OP.01	PELAYANAN PENERBITAN SKPLBI DAN SPKPLBI
				MOT-02.01.CFM.04	PENGAWASAN MUTU BARANG YANG SNI NYA DIBERLAKUKAN WAJIB	MOT-02.01.CFM.04.S OP.01	PENGAWASAN MUTU BARANG YANG SNI NYA DIBERLAKUKAN WAJIB
		MOT-02.02	PENYEDIAAN STANDAR ACUAN	MOT-02.02.CFM.01	PERUMUSAN SNI JASA BIDANG PERDAGANGAN	MOT-02.02.CFM.01.S OP.01	PERUMUSAN SNI JASA BIDANG PERDAGANGAN
		MOT-02.03	KOORDINASI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN	MOT-02.03.CFM.01	KOORDINASI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN	MOT-02.03.CFM.01.S OP.01	KOORDINASI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN

Level of Documentation



Latihan Memahami RPJMD / Renstra

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

**Perencanaan dan
Penganggaran**

Proses 1

**Pengelolaan Organisasi
dan Tatalaksana**

Proses 2

**Pengelolaan
SDM**

Proses 3

Pengawasan

Proses 4

**Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan yang Bermutu**

Proses 5

**Terwujudnya Budaya Pemerintahan
Bersih, Akuntabel, Transparan, dan
Bebas Korupsi**

Proses 6

**Angkatan Kerja yang Berpendidikan
dan Handal**

Proses 7

**Masyarakat yang Sehat
dan Berdayaguna**

Proses 8

**Peningkatan Pendapatan
Perkapita Masyarakat**

Proses 9

**Perkembangan Investasi
Daerah**

Proses 10

**Keseimbangan Pengembangan
Wilayah**

Proses 11

**Terpenuhi Kebutuhan Hidup
Minimum Masyarakat**

Proses 12

**Pengelolaan Administrasi
dan Umum**

Proses 13

**Pelayanan Teknologi
Informasi dan Publikasi**

Proses 14

**Layanan
Hukum**

Proses 15

FOKUS RJMD

Bab V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V - 1
5.1	Visi	V - 1
5.2	Misi.....	V - 2
5.3	Tujuan dan Sasaran.....	V - 3
5.3.1	Tujuan	V - 3
5.3.2	Sasaran	V - 4
 Bab VI	 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 VI – 1
 Bab VII	 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH..	 VII – 1

FOKUS RJMD

A. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Pertama :

“Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata.”

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Pertama sebagai berikut :

- r. Peningkatan produk dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan unggulan didukung oleh sistem dan jaringan agribisnis terpadu dan rintisan agroindustri, dengan program sebagai berikut:
 - a. Program Peningkatan Produk Pertanian Unggulan.
 - b. Program Perluasan Jaringan Bisnis dan Pasar Produk Pertanian.
 - c. Program Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Agribisnis (Hulu-Hilir).
 - d. Program Pembangunan / Pengembangan Industri di Bidang Agribisnis.
 - e. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura.
 - f. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan.
 - g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
 - h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.
 - i. Program Pengelolaan, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

FOKUS RENSTRA

Bab IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	28
A.	Visi.....	28
B.	Misi.....	29
C.	Tujuan dan Sasaran	29
D.	Strategi dan Kebijakan.....	31
Bab V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN.....	38

FOKUS RENSTRA

Visi : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pementapan perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja	Seluruh SKPD wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK dan Laporan Kinerja)
		Memberikan reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja SKPD	
		Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintahan melalui bimtek dan sosialisasi	
		Monitoring dan evaluasi capaian kinerja SKPD secara berkala	
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah	Fasilitasi, bintek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Mendorong SKPD untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kinerja dan data pendukung dengan baik, akurat dan valid	
		Meningkatkan tertib administrasi pertanahan	Tertib pensertifikatan tanah, workshop PPAT, penyelesaian permasalahan/konflik pertanahan

Rancangan Kegiatan Pemetaan Proses Bisnis

JADUAL PROGRAM

Langkah	Sasaran	Minggu																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Persiapan proyek dan studi dokumen																												
2	Analisis dokumen RPJMD, Renstra Organisasi, tusi, SOTK, dll																												
3	Penyusunan peta proses, peta sub proses, & peta relasi																												
4	Finalisasi peta proses, peta sub proses, & peta relasi																												
5	Penyusunan peta lintas fungsi																												
6	Finalisasi peta lintas fungsi																												
7	Penyusunan manual organisasi																												
8	Pengesahan dan Sosialisasi peta proses bisnis																												
9	Laporan akhir																												

Tentang Nara Sumber



CONTACT US:



Telp: (021) 2902 2128 – 29 / Faks: (021) 2902 2121



info@magnatransforma.com



**Grand Slipi Tower Lt. 33 Unit C
Jl. Letjend S. Parman Kav. 22 – 24
Jakarta 11480**